



Peran Pemberdayaan Masyarakat Pada Pengembangan Kawasan Kopi Di Provinsi Bengkulu

Fery Murtiningrum¹, Melinda Noer², Sri Wahyuni³, Dodi Devianto⁴

^{1,2,3}Agricultural Sciences, Andalas University, Limau Manis, Padang 25163, Indonesia

⁴ FMIPA Sciences, Andalas University, Limau Manis, Padang 25163, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat memainkan peran pada pengembangan kawasan kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian di ketahui bahwa pemberdayaan mempunyai peran yang penting bagi keberhasilan pengembangan kawasan kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Peran pemberdayaan masyarakat berbentuk dengan partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan pengembangan kawasan kopi. Pemberdayaan berperan pada keberhasilan pengembangan kawasan kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahian Provinsi Bengkulu.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Partisipasi, Kopi

Abstrack

This research aims to find out how community empowerment plays a role in the development of coffee areas in Rejang Lebong Regency and Kepahiang Regency, Bengkulu Province. This type of research is qualitative descriptive research. From the research results, it is known that empowerment has an important role in the successful development of coffee areas in Rejang Lebong Regency and Kepahiang Regency. The role of community empowerment takes the form of active community participation at every stage of coffee area development. Empowerment plays a role in the successful development of coffee areas in Rejang Lebong Regency and Kepahian Regency, Bengkulu Province.

Keywords : Empowerment, Participation, Coffea

PENDAHULUAN

Proses pembangunan merupakan upaya yang sistematis dalam rangka mencapai suatu tujuan secara berkesinambungan untuk pencapaian aspirasi manusia yang *humanistic* (Sukino, 2014). Pembangunan juga dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan dasar atas struktur dan sistem sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional dengan tetap menjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan ((Todaro, 2000; Rustiadi. et al, 2009) dengan peningkatan nilai produksi dan kapasitas (Adisasmita, 2010). Pembangunan dilakukan pada semua sektor termasuk sektor pertanian. Salah satu bentuk pembangunan pertanian yang dilakukan adalah perkebunan kopi. Pada perkembangannya pembangunan memberikan penekanan pada kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan regional. (pada wilayah Provinsi atau Kabupaten), pada lokasi dimana kegiatan pembangunan dilakukan maka digunakan pendekatan *spasial* (ruang), dan untuk wilayah perencanaan pembangunan yang mempunyai fungsi tertentu maka dikembangkan pendekatan kawasan, misalnya kawasan industri, kawasan tanaman pangan, kawasan hutang lindung, kawasan ekonomi khusus dan kawasan pertanian.



Pembangunan dengan pendekatan kawasan juga dilakukan di subsektor perkebunan, salah satunya adalah perkebunan kopi. Perkebunan kopi merupakan salah satu subsektor penting dari kegiatan pertanian karena perkebunan kopi mempunyai kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian Bangsa Indonesia. Perkebunan Kopi di Indonesia tersebar di beberapa wilayah di Indonesia termasuk salah satunya di Provinsi Bengkulu. Sebagai salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan, kopi merupakan produk yang mempunyai peluang pasar yang baik, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Pengembangan kopi sebagai penggerak perekonomian daerah mempunyai peluang sangat besar, khususnya bagi daerah daerah sentral kopi. Hal ini juga didukung dengan telah dirintisnya konsep kawasan agropolitan bagi beberapa wilayah perdesaan di Indonesia.

Pendekatan pemberdayaan yang telah digaungkan didalam pelaksanaan pembangunan masyarakat mensyaratkan bahwa masyarakat komunitas lokal, terutama masyarakat marginal yang selama bertahun tahun berposisi sebagai objek pembangunan yang keterlibatannya sebatas pelaksanaan pembangunan dari sebuah program yang telah diputuskan dan ditetapkan pemerintah mengalami perubahan menjadi subjek yang juga ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan.(Soetomo, 2018)

Pemberdayaan jika dilihat dari unsurnya berisikan kewenangan dan kemampuan, yang kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena jika masyarakat mempunyai kewenangan tetapi kemampuan untuk menggunakan, melaksanakan kewenangan ini tidak dimiliki, maka pemberdayaan belumlah terwujud. Sehingga dapat dimaknai bahwa ketidakberdayaan masyarakat terjadi karena minimnya kewenangan dan kemampuan. Demikian juga kewenangan dan kemampuan ini diikuti dengan kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan publik dalam perencanaan dengan melibatkan pemberdayaan peserta atau lebih tepatnya sebagai kontrol sosial, dimana partisipasi publik dikelola untuk mengamankan hasil tertentu (Aitken, 2010)

Di Provinsi Bengkulu, telah ada kegiatan Pengembangan kawasan kopi, berada di 2 lokasi Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam dokument Perencanaan Master Plan Agrowisata Kampung Kopi Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Petani kopi melakukan kegiatan pertanian kopi secara turun temurun yang merupakan warisan keluarga

Dari Survei awal yang dilakukan di beberapa lokasi pengembangan kawasan kebun kopi rakyat, diketahui bahwa masyarakat mengetahui bahwasannya wilayah mereka menjadi bagian dari *action plan* kawasan pertanian Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong dan *Master Plan* Agrowisata dari adanya kunjungan pihak pemerintah terkait ke lokasi *master plan*, Tetapi masyarakat termasuk pemerintah desa setempat belum mengetahui bagaimana dan seperti apa proses pengembangan kawasan kopi yang dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat setempat di lokasi yang menjadi rencana pengembangan kawasan kopi hanya menjadi penonton, tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan kawasan kopi. Padahal seyogyanya pembangunan pertanian merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Kondisi tidak terlibat secara langsung dalam pengembangan kawasan kopi, masyarakat setempat yang hanya menjadi penonton dari sebuah kebijakan pembangunan pertanian cenderung menjadi masa bodoh, terserah dengan apa yang di lakukan dari pihak pemerintah. Sikap masa bodoh dan merasa tidak dilibatkan cenderung akan menimbulkan



sifat apatis dari masyarakat, sehingga akan menjadi salah satu penyebab kegagalan dari pengembangan kawasan. Hal lain yang juga menjadi penting apakah program sebagai turunan dari sebuah perencanaan yang kemudian di berikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan pertanian juga penting untuk memperhatikan keterlibatan masyarakat, tetapi program pengembangan kawasan pertanian yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya dapat membuat petani lebih berdaya. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan (Syafa'at, et al 2016).

Dengan dasar ini kemudian penting dilakukan penelitian untuk melihat sejauh mana pemberdayaan dilakukan pada pengembangan kawasan pertanian kopi dan bagaimana bentuk bentuk pemberdayaan yang dilakukan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif (Sugiyono, 2018) dengan memaksimalkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Data yang terkumpul dideskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan kawasan pertanian kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagai perwujudan dari telah di tetapkannya dua lokasi ini sebagai lokasi pengembangan kawasan kopi di Provinsi memerlukan dukungan tidak hanya dari pemerintah daerah sebagai pihak yang menginisiasi program ini tetapi juga dari masyarakat dalam hal petani yang ada pada lokasi pengembangan kawasan kopi. Dukungan dari petani yang ada dilokasi pengembangan kawasan kopi dapat melalui berbagai bentuk seperti ikut terlibat dan aktif pada proses pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan kawasan kopi. Aktif terlibat ini dapat terjadi jika seseorang mempunyai tujuan atau dengan kata lain mempunyai niat mendapatkan sesuatu dari yang dilakukan. Di samping itu penting adanya kesadaran bahwa proses dan kegiatan yang dilakukan akan mendapatkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kesadaran ini bisa ada tumbuh ketika masyarakat berdaya atau dengan kata lain mempunyai kemampuan untuk memutuskan suatu hal.

Pemberdayaan masyarakat berjalan jika element element pemberdayaan berjalan dengan baik, dimana adanya pemberian informasi secara luas, jelas dan detail mengenai rencana pengembangan kawasan kopi. Penggalan kebutuhan kebutuhan masyarakat dalam hal ini petani kopi dilokasi pengembangan kawasan hendaknya dilakukan melalui FGD FGD secara berjenjang dan terpadu yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tentu saja di dampingi pihak pihak yang berkompeten seperti penyuluh pertanian karena keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan bukan hanya ditentukan oleh kondisi sumberdaya pertanian tetapi juga ditentukan oleh peran penyuluh pertanian (Faqih, 2014) Penyuluh pertanian mempunyai peran yang sangat strategis didalam mendukung program pembangunan pertanian dalam upaya memberdayakan petani dan sebagai penyambung informasi dari Dinas terkait (Pemerintah) kepada masyarakat petani.



Pemberdayaan pada petani melalui kelompok tani berbentuk memberikan kesempatan bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuai dengan keinginannya. Sejalan dengan yang di sampaikan Mardikanto, (2009) Pemberdayaan kelompok tani diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade utilitas* dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan memiliki arti pemberian keterampilan dan informasi pada anggota yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan kegiatan secara tepat untuk mengatasi sendiri masalah yang dihadapi. Bentuk bentuk Pemberdayaan masyarakat seperti di sampaikan Andayani, et al (2017) melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan atau dapat dilakukan dalam mengawal perencanaan pengembangan kawasan antara lain berupa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif pada saat pertemuan. Ruang kesempatan ini bisa terjadi tentu saja setelah masyarakat luas mendapatkan informasi mengenai kegiatan pengembangan kawasan kopi. Informasi yang didapatkan oleh masyarakat bisa melalui pihak pertama yaitu OPD Teknis terkait seperti Dinas pertanian. Bisa secara langsung di sampaikan melalui pertemuan pertemuan rutin yang dilakukan oleh kelompok tani atau dapat juga melalui penyuluh pertanian yang mendampingi secara rutin kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kelompok tani. Informasi bisa juga langsung dari Ketua kelompok di mana setelah ketua kelompok mendapatkan informasi dari kegiatan kegiatan di Kabupaten melalui Dinas Terkait, informasi ini dapat dengan baik tersalurkan jika ketua menyadari pentingnya anggota kelompok mendapatkan informasi dan ketua mau berbagi informasi dengan pihak lain. Pada saat informasi tidak diterima dengan baik oleh anggota kelompok inilah yang kemudian menjadi sumbatan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat umum sehingga menjadi sulit bagi mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan kegiatan pengembangan kawasan, karena mereka tidak merima informasi yang seharusnya mereka dapatkan. Meskipun telah mendapatkan informasi dan mendapatkan kesempatan tetapi jika masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan yang akan mereka ikuti maka proses pemberdayaan yang diharapkan akan berjalan dengan baik bisa menjadi terhambat.

Bentuk lain dari pemberdayaan yang dapat mendukung proses pengembangan kawasan ini adalah melalui sosialisasi rencana kegiatan pengembangan kawasan yang di dapat dilakukan secara berkelompok ataupun dilakukan secara cluster di tingkat Desa atau juga tingkat kecamatan. Sosialisasi ini bisa saja dilakukan melalui penyuluh pertanian sebagai perpanjangan tangan Dinas Pertanian, sehingga dengan adanya sosialisasi informasi mengenai rencana penyusunan perencanaan pengembangan kawasan pertanian dalam hal ini kopi dapat tersampaikan kepada masyarakat.

Dari informasi yang di terima dari infoman, kegiatan pengalihan kebutuhan masyarakat ini telah dilakukan oleh tim penyusun *master plan* dan *action plan* berbentuk pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat dan ketua kelompok tani sebagai perwakilan kelompok. Hanya saja pada perjalanannya kegiatan pengalihan kebutuhan masyarakat ini tersampaikan kepada anggota kelompok atau masyarakat tidak secara luas berjalan.

KESIMPULAN

Peran pemberdayaan masyarakat berbentuk dengan partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan pengembangan kawasan kopi. Pemberdayaan berperan pada keberhasilan



pengembangan kawasan kopi di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2010). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang* (Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aitken, M. (2010). A three-dimensional view of public participation in Scottish land-use planning: Empowerment or social control? *Planning Theory*, 9(3), 248–264. <https://doi.org/10.1177/1473095210366193>
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Faqih, A. (2014). Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam kegiatan pemberdayaan kelompok terhadap kinerja kelompok tani. *Agrijati*, 26(1), 41–60.
- Mardikanto. (2009). *Penyuluhan Pembangunan Kehutanan*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Kehutanan Republik Indonesia.
- Rustiadi, E, Saefulhakim.S, D. R. (2009). *Perencanaan dan pengembangan wilayah* (ke 4 Mei 2; A. E. Pravitasari, ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetomo. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat “Mungkinkah muncul antitesisnya?”* (IV). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukino. (2014). *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani* (1 ed.; Eri, ed.). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafa’at, N., Simatupang, P., Mardianto, S., & Pranadji, T. (2016). Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis Dalam Rangka Pemberdayaan Petani. *Forum penelitian Agro Ekonomi*. <https://doi.org/10.21082/fae.v21n1.2003.26-43>
- Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (D. H. M. . Munandar, ed.). Jakarta: Erlangga.